



DJKN

Laporan Kinerja

KPKNL DENPASAR

2022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis	3
D. Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Visi dan Arah Kebijakan	6
C. Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan	7
D. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja	11
C. Kendala dan Solusi	12
D. Realisasi Anggaran dan Capaian Output	15
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, KPKNL Denpasar telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar tahun 2022 sebagai wujud bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj ini merupakan pertanggungjawaban atas kerja keras dan kinerja segenap pegawai KPKNL Denpasar berkaitan dengan pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Denpasar Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur DJKN Nomor KEP-245/KN/2020.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja, besar harapan kami Laporan Kinerja KPKNL Denpasar dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Denpasar, 31 Januari 2023

Kepala KPKNL Denpasar



Untung Sudarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun yang dinamis dan penuh tantangan akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih belum pulih sepenuhnya dan ketidakstabilan ekonomi dunia akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Namun, KPKNL Denpasar tetap berupaya untuk mencapai kinerja terbaik dengan menggunakan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur dengan harapan dapat mencapai kinerja terbaik. Kerjasama yang baik antar pegawai dan pemangku kepentingan serta potensi yang besar di wilayah kerja KPKNL Denpasar mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Peta strategis KPKNL Denpasar tahun 2022 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi berupa pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang menetapkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) guna mencapai 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS). Secara umum, sebagian besar IKU tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan 17 (tujuh belas) IKU berstatus hijau dan 3 (tiga) IKU berstatus kuning dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107,34%.

Laporan kinerja tahun 2022 ini disusun dalam rangka menyediakan informasi yang akurat, akuntabel, dan transparan mengenai kinerja instansi. Laporan ini menjelaskan secara rinci mengenai hasil kinerja tahun 2022 dan perbandingan dengan hasil kinerja tahun sebelumnya, evaluasi, dan analisis kinerja sebagai informasi dan bentuk pertanggungjawaban kami. Kami akan selalu berusaha meningkatkan kinerja sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada satuan kerja, pengguna jasa, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

RINCIAN CAPAIAN KINERJA KPKNL DENPASAR

No.	Sasaran Strategis	Capaian
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	106,23%
2.	Pengelolaan Kekataan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	105,41%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	104,68%
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	107,45%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	120,00%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	114,31%
7.	Edukasi yang Efektif	102,04%
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	106,45%
9.	SDM yang Kompeten	120,00%
10.	Organisasi yang Fit for Purpose	103,66%
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	96,49%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Denpasar berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

Dalam melaksanakan tugasnya KPKNL Denpasar dituntut untuk *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggara *good governance* adalah akuntabilitas yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

KPKNL Denpasar mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang pada wilayah kerja yang meliputi 5 (lima) kabupaten dan kota di Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Denpasar memiliki dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- 2) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 8) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- 10) Pelaksanaan administrasi KPKNL

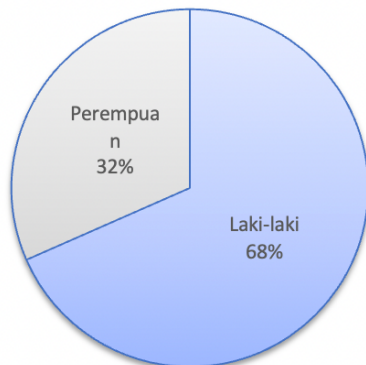
KPKNL Denpasar didukung oleh 38 orang pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari 1 Kepala Kantor, 5 orang Kepala Seksi, 11 Jabatan Fungsional dan 21 Pelaksana dari berbagai latar belakang. Struktur Organisasi KPKNL Denpasar dapat dilihat pada Gambar I.1.

Gambar I.1
Struktur Organisasi KPKNL Denpasar

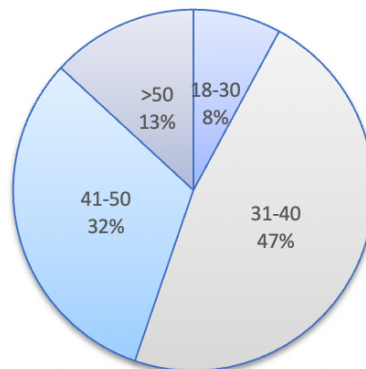


Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPKNL Denpasar didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 26 orang sementara untuk pegawai perempuan sebanyak 12 orang. Berdasarkan usia, pegawai KPKNL Denpasar diklasifikasikan ke dalam empat kompos usia. Terdapat 3 pegawai dalam kelompok usia 18-30 tahun, 18 pegawai dalam kelompok usia 31-40 tahun, 12 pegawai dalam kelompok usia 41-50 tahun, dan 5 pegawai dalam kelompok usia diatas 50 tahun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pegawai KPKNL Denpasar masih termasuk dalam kelompok usia produktif. Komposisi pegawai KPKNL Denpasar berdasarkan jenis kelamin dan usia ditunjukkan pada Gambar I.2 dan I.3

Gambar I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai KPKNL Denpasar menempuh pendidikan terakhir D4/S1 yaitu sebanyak 18 orang. Terdapat pula pegawai latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 2 orang, D1 sebanyak 5 orang, D3 sebanyak 6 orang, dan S2 sebanyak 7 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Gambar I.4.

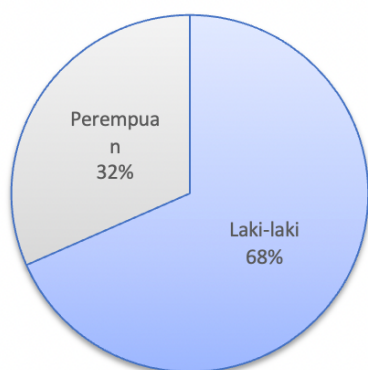
KPKNL Denpasar didukung oleh 38 orang pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari 1 Kepala Kantor, 5 orang Kepala Seksi, 11 Jabatan Fungsional dan 21 Pelaksana dari berbagai latar belakang. Struktur Organisasi KPKNL Denpasar dapat dilihat pada Gambar I.1.

Gambar I.1
Struktur Organisasi KPKNL Denpasar

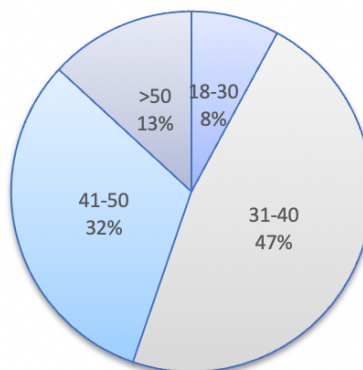


Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPKNL Denpasar didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 26 orang sementara untuk pegawai perempuan sebanyak 12 orang. Berdasarkan usia, pegawai KPKNL Denpasar diklasifikasikan ke dalam empat kelompok usia. Terdapat 3 pegawai dalam kelompok usia 18-30 tahun, 18 pegawai dalam kelompok usia 31-40 tahun, 12 pegawai dalam kelompok usia 41-50 tahun, dan 5 pegawai dalam kelompok usia diatas 50 tahun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pegawai KPKNL Denpasar masih termasuk dalam kelompok usia produktif. Komposisi pegawai KPKNL Denpasar berdasarkan jenis kelamin dan usia ditunjukkan pada Gambar I.2 dan I.3

Gambar I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



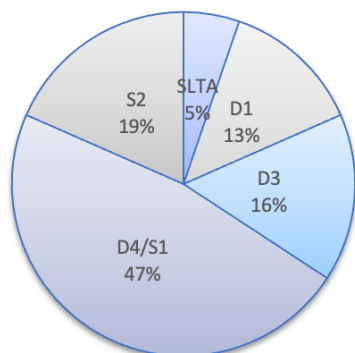
Gambar I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



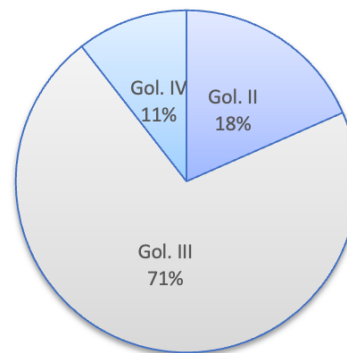
Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai KPKNL Denpasar menempuh pendidikan terakhir D4/S1 yaitu sebanyak 18 orang. Terdapat pula pegawai latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 2 orang, D1 sebanyak 5 orang, D3 sebanyak 6 orang, dan S2 sebanyak 7 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Gambar I.4.

Gambar I.5 menunjukkan komposisi pegawai KPKNL Denpasar berdasarkan golongan. Terdapat 27 pegawai golongan III, 7 pegawai golongan II, dan 4 pegawai golongan IV.

Gambar I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



C. Peran Strategis

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang menghasilkan penerimaan negara yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan serta memberikan layanan kepada masyarakat. Pelayanan KPKNL Denpasar memiliki peran strategis baik bagi pemangku kepentingan baik instansi pemerintah, instansi/Lembaga swasta maupun masyarakat umum. Pengguna jasa KPKNL Denpasar meliputi lembaga perbankan yang dimiliki pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, lembaga non perbankan seperti BUMN dan instansi pemerintah lainya serta masyarakat umum yang memerlukan jasa pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. Beberapa peran strategis yang dimiliki KPKNL Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengelolaan kekayaan negara meliputi pelaksanaan tugas pelayanan inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara serta registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara. Dalam hal ini, KPKNL Denpasar menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara (BMN) dan/atau kekayaan negara.

2. Penilaian

Pelaksanaan penilaian kekayaan negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara (BMN) yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Pengurusan Piutang Negara

Piutang Negara yang dikelola oleh KPKNL Denpasar adalah piutang yang ada dan besarnya pasti, telah dilakukan upaya penagihan yang optimal, dan dikategorikan sebagai piutang macet

yang diserahkan oleh instansi pemerintah yang timbul karena perjanjian, peraturan perundang-undangan maupun sebab apapun yang pengurusannya diserahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / KPKNL Denpasar. Pengelolaan Piutang Negara dimaksud adalah pengurusan piutang negara untuk ditagih dan diselesaikan baik melalui lelang eksekusi maupun di luar lelang. Hasil dari pengelolaan ini yang berupa pokok piutang akan diserahkan kepada instansi penyerah piutang, sedangkan biaya administrasi pengurusan piutang negara akan disetor ke kas negara.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat atas barang-barang yang dibeli melalui jual beli secara lelang dilakukan oleh dan di depan pejabat lelang yang berwenang, dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, bea lelang yang dibebankan relatif rendah. Seiring dengan perkembangan teknologi, pelayanan lelang oleh KPKNL Denpasar menawarkan berbagai kemudahan kepada penjual maupun calon pembeli. Bagi penjual pendaftaran lelang dapat dilakukan secara daring kemudian mengirimkan dokumen kelengkapan kepada KPKNL untuk dilakukan verifikasi dan dijadwalkan pelaksanaan lelangnya. Sementara bagi calon pembeli, dengan adanya lelang.go.id memberikan kemudahan untuk melihat pengumuman dan mengikuti lelang kapanpun dan dimanapun. Tidak dipungkiri bahwa simplifikasi prosedur pelayanan lelang dan hadirnya lelang melalui aplikasi internet mampu menjangkau lebih banyak peminat dan mencapai hasil yang lelang yang optimal.

5. Kontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pelayanan yang diberikan KPKNL Denpasar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara yang tidak sedikit jumlahnya. Kontribusi tersebut berasal dari pengelolaan kekayaan negara, pembebanan biaya administrasi (Biad) pengurusan piutang negara dan bea lelang baik dari pihak penjual dan pembeli.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPKNL Denpasar Tahun 2022 ini kami sajikan dengan sistematika laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis, dan sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, visi dan arah kebijakan, misi, tujuan sasaran, program dan perjanjian kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, evaluasi dan analisis kinerja dan serta realisasi anggaran

5. Bab IV. Penutup

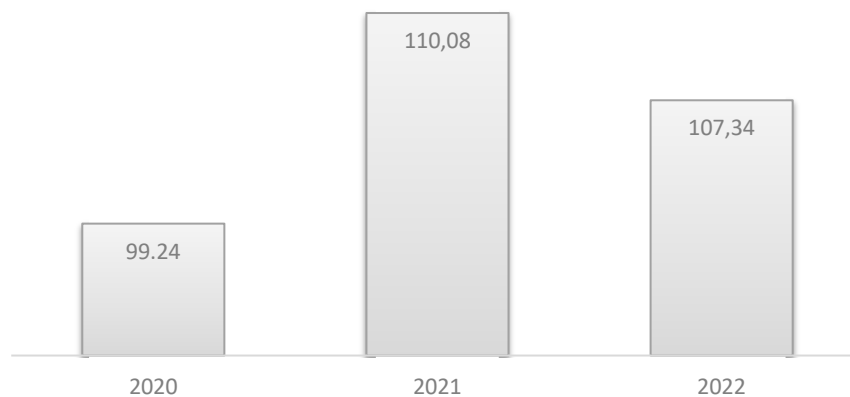
Bagian ini menguraikan tentang langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang, struktur organisasi, kontrak kinerja, rincian target, sasaran kerja pegawai, perjanjian kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan perbandingan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Secara umum KPKNL Denpasar dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 17 (tujuh belas) IKU berstatus hijau dan 3 (tiga) IKU berstatus kuning. Hasil pengukuran kinerja menggambarkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Denpasar Tahun 2022 tercapai sebesar 107,34%. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan NKO pada tahun 2021 sebesar 110,08% namun telah lebih baik dibanding NKO pada tahun 2020 sebesar 99,24%. Adapun Data Realisasi tersebut kami sampaikan secara rinci pada Lampiran I, sementara perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan dua tahun sebelumnya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Gambar III. 1 NKO KPKNL Denpasar Tahun 2020-2022



B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Di tahun 2022 KPKNL Denpasar masih menghadapi situasi yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pasca pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya pulih. Namun dari sisi pelayanan, pada dasarnya pandemi covid-19 tidak mempengaruhi upaya peningkatan kualitas pelayanan KPKNL Denpasar sehingga Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) baik eksternal maupun internal masih dalam taraf baik. Dilakukan optimalisasi teknologi yang mendukung pengembangan inovasi secara berkelanjutan, sehingga sejumlah layanan mulai memanfaatkan *website* dan aplikasi baik *desktop* maupun *mobile*. Pelaksanaan sosialisasi terkait SOP kepada para pemangku kepentingan dilakukan secara daring guna percepatan penyelesaian pekerjaan dan memberikan kemudahan untuk memperoleh layanan dan/atau informasi yang dibutuhkan.

Adapun kinerja pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara selama tahun 2022 mampu mencapai seluruh target IKU pada Kemenkeu-three KPKNL Denpasar yang berkaitan dengan

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Peningkatan aktivitas perekonomian di Bali turut mendorong peningkatan jumlah permohonan pengelolaan BMN sebesar 10,4% dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini turut tercermin dari meningkatnya tren Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun 2020, lebih lanjut persentase kenaikan PNBP dari pengelolaan BMN meningkat sebesar 17,88% dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Disamping itu, pengelolaan BMN di wilayah kerja KPKNL Denpasar turut mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan summit KTT G20 di bulan November 2022, antara lain mendukung pengembangan infrastruktur Taman Hutan Rakyat Mangrove, Nusa Dua, dan pelabuhan Sanur.

Terkait dengan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah tahun 2022, berkat sinergi yang baik dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian terkait, target penyelesaian sertifikasi berhasil tercapai. Penyelesaian BMN berupa tanah yang belum bersertifikat sebanyak 59 bidang tanah dari target sebesar 51 bidang tanah (116%) dan penyelesaian BMN berupa tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga telah tercapai seluruhnya sebanyak 436 bidang tanah. Target yang menantang lainnya meliputi penyelesaian Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) BMN dengan capaian sebesar 116,12% dan penyelesaian evaluasi kinerja BMN (Portofolio BMN) sebesar 110%. Pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja (Satker) berupa pelaksanaan sosialisasi ataupun bimbingan teknis terus dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan BMN di wilayah kerja KPKNL Denpasar.

Sementara Seksi piutang negara semakin menggalakkan kegiatan penagihan langsung ke debitur dan melakukan koordinasi yang baik serta kerjasama yang aktif dengan pemangku kepentingan. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi jumlah *outstanding* piutang negara dan menghasilkan PNBP yang cukup besar melalui program keringanan utang dan validasi data debitur untuk kepentingan korespondensi dan penagihan.

Di sisi pelayanan lelang, pasca pandemi dan kondisi ekonomi global yang juga berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional berdampak pada penurunan minat pembeli yang efeknya terjadi penurunan persentase produktifitas lelang dari 40,74% di tahun 2021 menjadi 38,70% di tahun 2022. Implementasi *E-Auction* juga semakin digiatkan melalui lelang pemanfaatan situs lelang.go.id.

C. Kendala dan Solusi

Pasca pandemi covid-19 masih relatif berdampak dalam kinerja tahun 2022. Hal ini ditambah juga dengan ketidakseimbangan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional dan regional. Dampak perekonomian menurun secara global memberi efek pada penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara diperoleh dari 3 (tiga) komponen, yaitu PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp 16.508.379.257,-, PNBP Piutang Negara sebesar Rp 296.069.055,- serta PNBP Lelang sebesar Rp 21.461.249.586,-.

Secara garis besar kendala yang dihadapi yaitu pasca pandemi covid-19 dan perekonomian nasional dan regional yang terpengaruh kondisi ekonomi global. Kondisi ini melahirkan kebijakan-kebijakan baru di berbagai bidang. Pada layanan lelang, terjadi penurunan minat pembeli lelang. Selain itu terdapat pula pembeli lelang yang wanprestasi sehingga berdampak pada turunnya produktivitas lelang. Dari segi pelaksanaan, sejumlah lelang yang akan dilaksanakan dibatalkan oleh pihak penjual padahal terdapat peserta lelang yang akan mengajukan penawaran. Dari segi administrasi, terdapat sejumlah persyaratan yang gagal dipenuhi oleh pemohon lelang sehingga lelang nya dibatalkan. Pada kondisi ini, pelayanan lelang hanya dapat menyumbangkan realisasi pokok lelang sebesar Rp583.035.849.986,-, tidak mencapai target yaitu sebesar Rp642.000.000.000,- yang diukur dari nilai pokok lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian.

Dari sisi Pengelolaan Kekayaan Negara, menantanginya beberapa target kegiatan strategis antara lain penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah dan penyelesaian SBSK memerlukan koordinasi dengan internal DJKN dan Kementerian/lembaga yang lebih intensif. Salah satu kendala yang cukup krusial ialah terbatasnya SDM pada satker yang menjadi objek target, dan kurangnya awareness PIC BMN pada satker terkait dengan peraturan pengelolaan BMN. Hal ini menjadi penting mengingat saat ini beberapa proses pengelolaan BMN sebagian kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pengguna Barang, sehingga PIC BMN harus memahami regulasi pengelolaan BMN baik itu terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang tersebut. Terhadap tantangan ini, seksi PKN akan terus menggalakkan pemberian sosialisasi, dukungan teknis dan pelatihan kepada PIC BMN masing-masing satker. Disamping itu, seksi PKN akan mendorong pelaksanaan knowledge management terkait pengelolaan BMN di tiap satker, sehingga terwujudnya kesinambungan pemahaman pengelolaan BMN pada saat terjadinya pergantian PIC BMN di satker.

Pada Seksi Piutang Negara kendala terbesar yaitu alamat debitur kurang lengkap dan jelas sehingga pengiriman surat dalam rangka penagihan menjadi terhambat bahkan di beberapa kasus surat penagihan tidak sampai kepada debitur. Namun demikian, nilai outstanding piutang negara yang berhasil diturunkan yaitu sebesar Rp7.615.326.615,- dari target yang telah ditentukan sebesar Rp5.500.000.000,00.

Pada Seksi Penilaian secara umum permasalahan yang dihadapi adalah terdapat sejumlah objek penilaian yang berada di luar wilayah kerja KPKNL Denpasar. Pada Seksi Hukum dan Informasi terdapat sejumlah komplain terkait pengembalian uang jaminan lelang yang secara umum disebabkan oleh kekeliruan pengisian data oleh peserta lelang. Bendahara penerimaan juga mengalami kesulitan untuk menelusuri sumber dana mengendap baik dari seksi lelang maupun seksi piutang negara sehingga diperlukan proses yang cukup panjang untuk menyelesaikannya. Selain itu adanya peningkatan jumlah perkara di peradilan dan atau penyidikan kepolisian terkait lelang yang cukup signifikan yang menempatkan KPKNL sebagai pihak tergugat, saksi, maupun pemberi keterangan oleh penyidik.

Guna menghadapi kendala dan permasalahan yang ada, KPKNL Denpasar melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah antisipasi serta solusi sebagai berikut:

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan dan satuan kerjanya yang menjadi target dalam rangka percepatan penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah.
- b. Bersinergi dengan satuan kerja dalam pengumpulan data dan pengukuran BMN untuk penyelesaian target SBSK.
- c. Melaksanakan pengumpulan referensi dan data evaluasi kinerja BMN/Portofolio baik itu data dari satker maupun data sekunder lain yang diperlukan.
- d. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan satuan kerja terkait wasdal pengelolaan BMN.
- e. Melibatkan pegawai dari seksi lain untuk percepatan pencapaian target;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis secara luring maupun daring dengan mengoptimalkan penggunaan media komunikasi (Whatsapp group, zoom meeting)
- g. Implementasi BMN Award sebagai stimulan peningkatan kinerja dan

2. Seksi Piutang Negara

Melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang dengan melakukan penagihan langsung untuk mengetahui kondisi debitur yang sebenarnya;

3. Seksi Pelayanan Lelang

- a. Melakukan sosialisasi lelang, publikasi untuk menarik minat masyarakat mengikuti lelang serta melakukan koordinasi secara intensif dengan Penjual terkait dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen lelang;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pusat serta memberikan pemahaman dengan baik kepada pemohon lelang terkait dengan persyaratan lelang yang sulit dipenuhi;
- c. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemenang lelang terkait dengan pelunasan kewajiban lelang sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Seksi Pelayanan Penilaian

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu pemilik objek, KPKNL setempat, dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara agar penyelesaian penilaian tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Hukum dan Informasi

- a. Memberikan sosialisasi berupa publikasi informasi kepada masyarakat peminat lelang untuk mengisi data peserta lelang secara lengkap dan benar;
- b. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Seksi Piutang Negara dan Seksi Lelang guna penyelesaian dana mengendap;
- c. Melaksanakan penanganan perkara perdata di pengadilan dan atau penyidikan kepolisian secara maksimal dengan memperkuat koordinasi dan konsultasi kepada Kanwil DJKN Balinusra, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, Biro Advokasi Setjen Kemenkeu maupun pihak-pihak lain terkait.

6. Seksi Kepatuhan Internal

- a. Mereviu dan mendokumentasikan dokumen kinerja dengan baik;
- b. Mempersiapkan bahan Focus Group Discussion (FGD).

7. Sub Bagian Umum

- a. Menghimbau pejabat dan/atau pegawai untuk mengikuti diklat *cross function* dan diklat lain yang disediakan baik dari DJKN maupun BPPK;
- b. Melakukan koordinasi dengan KPPN;
- c. Melakukan koordinasi dan mengikuti arahan Kantor Pusat DJKN.

D. Realisasi Anggaran dan Capaian Output

Tabel III.1 Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian Output (%)
1.	Pegawai	0	0	0
2.	Barang	1.559.384.000,-	1.554.713.671,-	97,21
3.	Modal	0	0	0

Tabel III.2 Realisasi Berdasarkan Rincian Output

No.	Rincian Output	Target Volume RO	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi RO	Capaian Output (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	10	1.346.000,-	35	350
2.	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	20	1.997.000,-	60	300
3.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	175	49.123.000,-	334	190,86
4.	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	1.150	74.924.000,-	1.155	100,43
5.	Risalah Lelang	850	34.758.000,-	1.125	132,35
6.	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	10	1.536.000,-	10	100
7.	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan	487	13.278.000,-	487	100
8.	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	50	15.818.000,-	55	110
9.	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	446	49.176.000,-	484	108,52
10.	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	7.224.000,-	1	100
11.	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	9.045.000,-	2	200
12.	Penggalian Potensi Lelang	1	8.130.000,-	1	100
13.	Aset BUN yang Dikelola	4	27.405.928,-	4	100
14.	Layanan Bantuan Hukum	66	30.696.000,-	66	100
15.	Kerumahtanggaan	12	43.635.000,-	12	100
16.	Layanan Perkantoran	12	1.171.062.943,-	12	100
17.	Kehumasan	12	6.360.000,-	12	100
18.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	9.198.000,-	7	140
Total			1.554.713.671,-		

BAB IV PENUTUP

KPKNL Denpasar sebagai salah satu unit yang melakukan kegiatan pengelolaan kekayaan negara, penilaian aset, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang telah melaksanakan tugas dengan optimal. Selanjutnya dalam rangka menghadapi berbagai tantangan ke depan, KPKNL Denpasar telah menyusun strategi yang akan dilakukan agar senantiasa mampu melakukan perbaikan diri dan optimalisasi kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas database pengelolaan kekayaan negara dan penilaian, optimalisasi pengurusan piutang negara, penggalian potensi lelang untuk akselerasi produktivitas lelang dan efektivitas hasil lelang;
2. Penggalian potensi piutang negara dan penilaian guna meningkatkan peran KPKNL Denpasar dalam hal kontribusi secara regional;
3. Peningkatan pengamanan dan optimalisasi penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan negara;
4. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN di tingkat Kuasa Pengguna Barang, dengan pula mendorong penguatan fungsi korwil masing-masing Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Denpasar;
5. Mengoptimalkan peran Pengelola Barang dalam hal peningkatan progres dan kualitas sertifikasi tanah BMN, SBSK, dan Portfolio;
6. Penyusunan dan penerapan *asset planning* dalam rangka perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN;
7. Meningkatkan intensitas koordinasi dan penggalian potensi lelang produk UMKM guna ikut berperan dalam pemulihan perekonomian regional;
8. Mengoptimalkan fungsi media sosial sebagai pendukung layanan, penyebaran informasi, dan sebagai komunikasi kepada masyarakat guna mendukung sinergi Kemenkeu One.

Penyelesaian Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Denpasar, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Semua kendala dan hambatan yang hadir telah memberikan semangat dan motivasi kepada segenap personil KPKNL Denpasar untuk bekerja lebih cerdas sehingga seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia di tahun 2022 masih pada masa pemulihan pasca pandemi covid-19, tapi ini tidak menjadi halangan bagi KPKNL Denpasar dalam memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa layanan.

LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai (%)
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	104,95%	104,95
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	38,70%	107,51
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	90,82%	90,82
		2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	100%	138,46%	120,00
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,7	4,92	104,68
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	81,83%	120,00
		4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	101,64%	101,64
		4c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	100,78%	100,78
		4d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pengguna layanan KPKNL	100%	110,00%	110,00
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	1,56%	120,00
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,61
		6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	0,38%	120,00
7.	Edukasi yang efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93	94,90	102,04
8.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	93,33%	109,80

		8b-N	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti	97%	100%	103,09
9.	SDM yang kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120,00
10	Organisasi yang fit for purpose	10a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85	84	98,82
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	82,55	103,19
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	98,06	108,96
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	92,15%	96,49

Lampiran II. Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Dua Tahun Sebelumnya

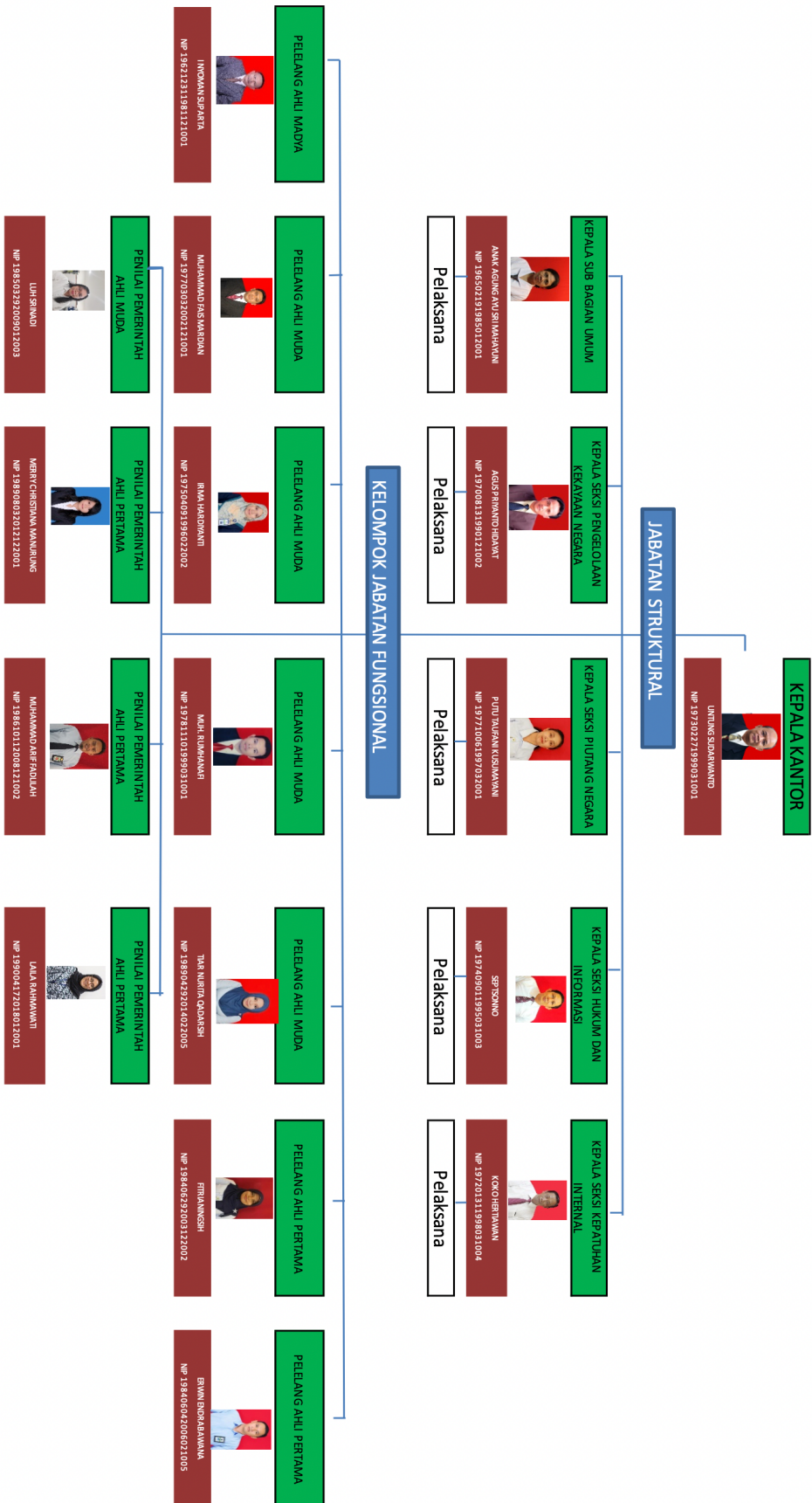
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	62,44%	125,72%	104,95%
		Persentase produktivitas lelang	39,04	40,74	38,70%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang	60,60%	127,96%	90,82%
		Persentase Penurunan outstanding piutang negara	3,07%	113%	138,46%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,74	4,71	4,92
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	81,83%	81,83%
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	105,67%	79,92%	101,64%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP	112,42%	103,63%	100,78%
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pengguna layanan KPKNL	135,42%	100,65%	110,00%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	6,70%	6,84%	1,56%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100%	100%	100%
		Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	6,75%	0,38%
7.	Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	94,50	95,05	94,90
8.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	69,70%	94%	93,33%

		Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti	-	-	100%
9.	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	106,36%	110%	120%
10	Organisasi yang fit for purpose	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	-	-	84
		Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	95	85,53	82,55
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	94,87	98,06
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	98,71%	95,76%	92,15%

Keterangan:

Tanda (-) menunjukkan bahwa tidak terdapat IKU tersebut pada tahun sebelumnya

Lampiran III. Struktur Organisasi



Lampiran IV. Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Denpasar



**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7/KN.26/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR**

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,7
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
8	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
9	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
10	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5

	Kegiatan	Anggaran
1.	<Nama Kegiatan>	Rp <Anggaran>
2.	<Nama Kegiatan>	Rp <Anggaran>
3.	<Nama Kegiatan>	Rp <Anggaran>
4.	<Nama Kegiatan>	Rp <Anggaran>
5.	<Nama Kegiatan>	Rp <Anggaran>
6.	<Nama Kegiatan>	Rp <Anggaran>
7.	<Nama Kegiatan>	Rp <Anggaran>
8.	<Nama Kegiatan>	Rp <Anggaran>

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Anugrah Komara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar



Ditandatangani Secara Elektronik
Untung Sudarwanto

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20	25	25	30	30	36	36
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25	50	50	75	75	100	100
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						4,7	4,7
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50	50	55	55	65	65
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25	50	50	75	75	100	100
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	40	40	75	75	100	100
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19	19	19	19	19	19	19
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92	92	92	92	92	92	92
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
7	Edukasi yang Efektif							

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi		93	93		93	93	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara		40	40		40	85	85
8b-N	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti						97	97
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	100	100
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM						85	85
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja						80	80
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Untung Sudarwanto

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat Dukungan pembaca layer diaktifkan.	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimantapkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimantapkan	Q1 s.d. Q4 2022	Seksi PKN	<Anggaran>
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pelabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Uritandatangani Secara Elektronik
 Untung Sudarwanto

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Untung Sudarwanto	NAMA	Anugrah Komara
NIP	197302271999031001	NIP	196211251983101001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara

NO (1)	RENCANA KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
2	Peningkatan Kontribusi Lelang Terhadap Perekonomian di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar	Persentase Produktivitas Lelang	36
3	Pengelolaan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
4	Pengelolaan Piutang Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
5	Kepuasan Pengguna Layanan di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,7
6	Pengelolaan Kekayaan Negara di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65
7	Pengelolaan Kekayaan Negara di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100
8	Pengelolaan Piutang Negara di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100
9	Pengelolaan Kekayaan Negara di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
10	Pelaksanaan Penilaian di Wilayah KPKNL Denpasar yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



11	Penerapan Tata Kelola Lelang yang Efektif di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10
13	Edukasi yang Efektif bagi Pengguna Jasa KPKNL Denpasar	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif pada KPKNL Denpasar	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85
15	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif pada KPKNL Denpasar	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang diitindaklanjuti	97
16	SDM KPKNL Denpasar yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100
17	Organisasi KPKNL Denpasar yang Fit for Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
18	Organisasi KPKNL Denpasar yang Fit for Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
19	Organisasi KPKNL Denpasar yang Fit for Purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
20	Pengelolaan Keuangan dan BMN pada KPKNL Denpasar yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Untung Sudarwanto
NIP 197302271999031001

Denpasar, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Anugrah Komara
NIP 196211251983101001

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022

